



HUBUNGAN DPRD-PEMKOT

## Dewan Enggan Bahas RPJMD

**UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja enggan membahas dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja 2017-2022.**

Ujang Hasanudin  
[hasanudin@harianjogja.com](mailto:hasanudin@harianjogja.com)

Alasannya, wakil rakyat itu merasa ada tahapan yang tidak dilalui Pemerintah Kota, yakni mengirimkan rancangan awal RPJMD ke Dewan sebelum membahas rancangan akhir RPJMD.

Padahal RPJMD sebenarnya akan dipaparkan pada Kamis (12/10) malam kemarin. Namun dalam rapat pimpinan, siang kemarin, Dewan mengembalikan lagi dokumen RPJMD ke Pemerintah Kota. "Tidak ada paripurna persetujuan draf rancangan awal, tiba-tiba kami diminta menerima draf rancangan akhir RPJMD, ini bagaimana?" kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Danang Rudiatmoko.

Danang mengatakan, pembahasan RPJMD sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54/2010 tentang Tahapan-Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD sebenarnya akan dipaparkan pada Kamis (12/10) malam.

Dewan mengembalikan lagi dokumen RPJMD ke Pemerintah Kota.

Permendagri tersebut menyebutkan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan dalam waktu 10 pekan setelah dilantik menjadi kepala daerah. Menurut dia, RPJMD merupakan "kitab sucinya" Kota Jogja yang harus dibahas serius melibatkan legislatif sebagai representasi warga Jogja.

Saat ini, Danang melanjutkan, Dewan sulit memberi masukan karena RPJMD sudah rancangan akhir. Sementara batas waktu pembahasan hanya sampai awal November karena 22 November harus sudah disahkan. "Kami tidak mau menyetujui sesuatu yang melanggar tata kala," ucap dia.

Ia menegaskan, sikap fraksinya tersebut semata-mata untuk menegakkan aturan agar tidak ada temuan hukum di kemudian hari. Senada disampaikan Ririk Banowati dari Fraksi Gerindra. Menurut dia, Pemerintah Kota Jogja harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada provinsi terkait dengan adanya tahapan penyusunan RPJMD yang dilanggar.

Hasil konsultasi tersebut harus disampaikan ke Dewan secara tertulis untuk kemudian dibahas bersama semua pimpinan dan alat kelengkapan Dewan. "Hasil tertulis harus ada," ucap dia yang juga Wakil Ketua DPRD.

**Mengingatn**  
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M Ali Fahmi mengatakan, sesuai tahapan semestinya rancangan awal RPJMD disampaikan maksimal pada Agustus lalu. Namun itu

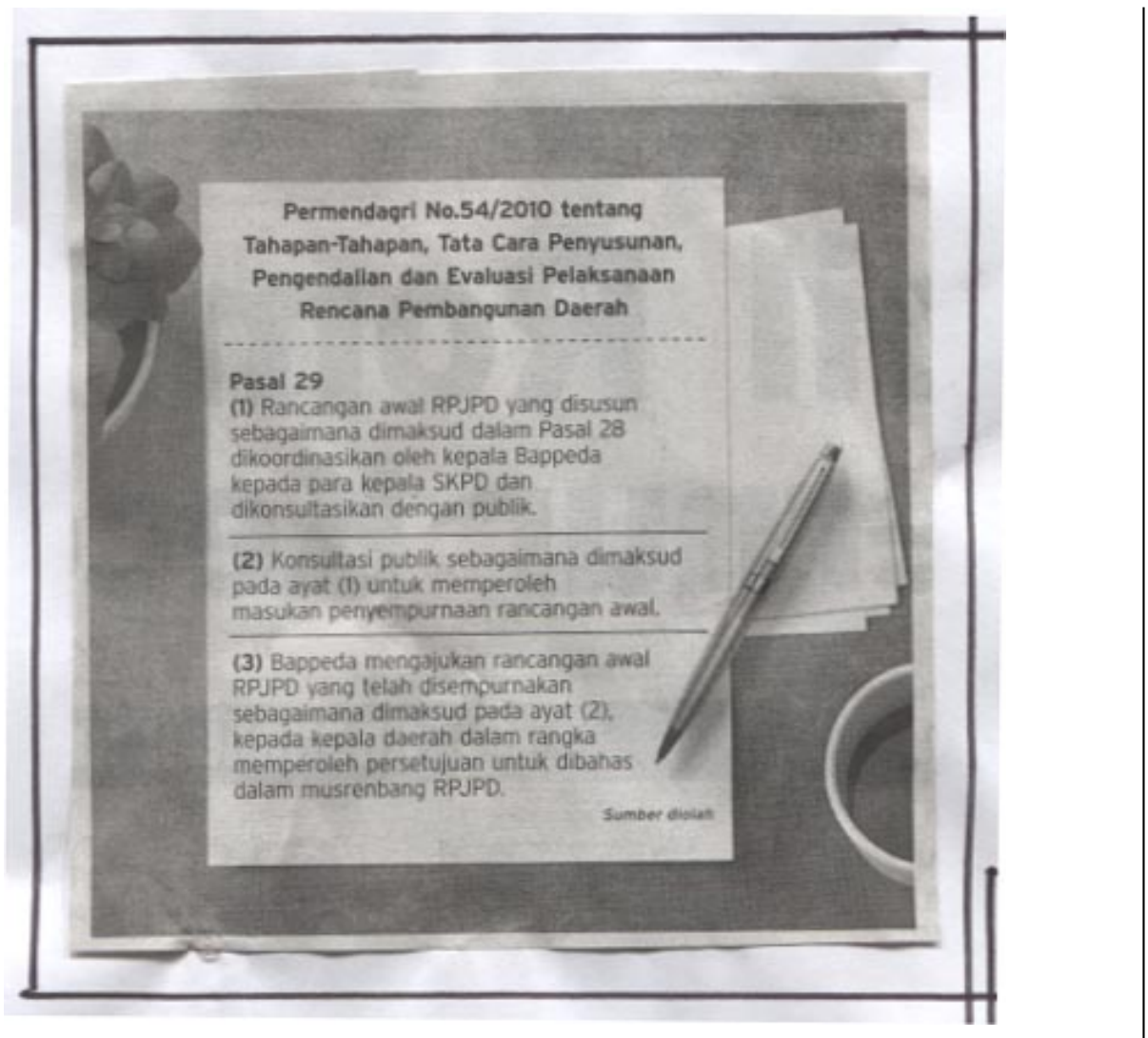
Kota Jogja Haryadi Suyuti sempat menandatangani nota kesepakatan hasil musrenbang yang disebut sebagai rancangan awal RPJMD. Menurut dia, musrenbang tidak masuk dalam tahapan pembahasan RPJMD.

Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko saat dihubungi mengakui, sempat menandatangani saat menghadiri musrenbang pada Agustus lalu. Namun, anggota DPRD asal PDI Perjuangan ini menegaskan, tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan keahlihiran. "Tidak ada persetujuan nota kesepakatan," ujar Koko, sapaan akrabnya.

Jika tanda tangan kehadiran itu dianggap persetujuan rancangan awal RPJMD, ia sangat menyayangkan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad belum bisa berkomentar terkait dengan sikap Dewan tersebut. Sesuai rapat pimpinan Dewan, ia langsung menemui Wali Kota Jogja hingga sore, "Masih di ruang Pak Wali," ucap dia.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, sebelumnya mengatakan, tidak ada tahapan yang dilanggar dalam penyusunan RPJMD. Menurut dia, ada perbedaan pandangan dalam proses penyerahan draft RPJMD ke DPRD Kota Jogja. Yaitu yang berdasarkan pada Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Permendagri. Pihaknya juga sudah mengkomunikasikan dengan Dewan.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005